
 <p>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN</p>	<p>MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</p>
	<p>Diterima 20 SEP 2007</p>
<p>Inventarisasi : 3705/FH/Hd. 9/2007</p>	
<p>Klasifikasi : SPK1 331.026 Pau A</p>	
<p>Subyek : Industrial relations</p>	

 <p>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN</p>	<p>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</p>
	<p>FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum</p>

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

Vincentius a Paulo Mitak

NPM : 02 05 07906
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :

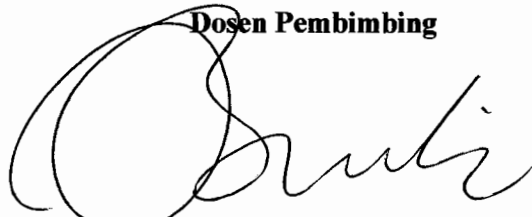
Vincentius a Paulo Mitak

NPM : 02 05 07906
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 agustus 2007

Dosen Pembimbing



N. BUDI ARIANTO W., SH.M.HUM

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim
penguji ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 September 2007**
Tempat : **Ruang Dosen Lantai II Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

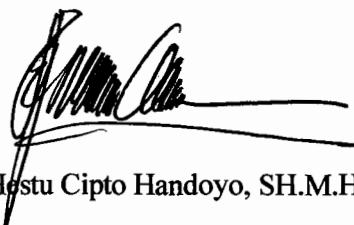
Ketua : **F.X.Suhardana**
Sekretaris : **N. Budi Arianto, SH.,M.Hum**
Anggota : **Imma Indra Dewi,SH.,M.Hum**

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B. Hostu Cipto Handoyo, SH.M.Hum)

HALAMAN MOTTO

**Jańgan menunda sampai esok, pekerjaan yang kamu
lakukan hari ini**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas anugerah dan berkat Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan segala proses studi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

Penulisan Hukum ini di buat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari Isi dan uraian dalam penulisan hukum ini tidak sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dan penyempurnaan tulisan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapa dan mama, Kakak Bertin sekeluarga, Kakak Ratna sekeluarga, kakak Richie, Adol, Luis Grignon
2. Keluarga besar Mitak dan Romas,
3. Dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Teman – teman di Persaudaraan Langke Rembong Yogya, Kertas, Kopro, charamel, Manggarai Major 7th & 7th community, angkatan 2002 Fakultas Hukum UAJY.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan hukum ini.

ABSTRACT

The harmonious industrial relationship in a company comes from good collective work agreement which give law protection for rights and obligations of workers and entrepreneur. The harmonious industrial relationship will be got by contents and exercise of collective work agreement that be stems on sense of law both workers and entrepreneur. Sense of law is required to become guidance for behavior of workers and entrepreneur in the company and can influence contents of collective work agreement, so the dispute of the relation of industrial caused by lack of regulation about manpower can be lessened or eliminated.

The research purpose which is done by writer to obtain data about the role of government through tripartite cooperation institute in a sub province /city in the effort increasing the sense of law of workers and entrepreneur, so the existence of collective work agreement can gives law protection to the rights and obligations of workers and entrepreneur to reach the relation of industrial which harmonious in company.

Law empirics Research done by writer with holding an interview guest speaker member of tripartite cooperation institute government city of Yogyakarta obtains data that the harmonious industrial relation can be reached by executing construction the industrial relation. Ministry manpower and transmigration Government city of Yogyakarta needs regulation to execute construction of the industrial relation, so tripartite cooperation institute government city gives suggestion to government city of Yogyakarta to formulate construction policy of the industrial relation in Yogyakarta city.

The result of construction industrial relation can be seen in contents and exercise of collective work agreement in company which coming from good sense of law from both workers and entrepreneur, so the collective work agreement can be executed because it gives law protection for the rights and obligations of workers and entrepreneur.

Key words: Dispute of the industrial relation, collective work agreement, law protection, improvement of understanding about manpower regulation, sense of law, harmonious industrial relation, source of law, construction of the industrial relation,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta
Yang menyatakan

Vinsensius a Paulo Mitak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Konsep	8
F. Metode Penelitian Hukum	11
G. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN	
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA YOGYAKARTA	16
A. Tinjauan Tentang Hubungan Industrial	16
1. Pengertian Hubungan Industrial	16
2. Pihak-Pihak Dalam Hubungan Industrial	17

3. Pelaksanaan Hubungan Industrial	43
B. Tinjauan Tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit	53
1. Pengertian Lembaga Kerjasama Tripartit	53
2. Tugas Pokok Lembaga Kerja Sama Tripartit	54
3. Struktur Organisasi dan Pertanggung Jawaban Lembaga Kerja Sama Tripartit	55
4. Keanggotaan dan Komposisi Keanggotaan Unsur Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Dan Pemerintah Dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit	58
C. Tinjauan tentang Pembinaan Hubungan Industrial	71
1. Pengertian Pembinaan Hubungan Industrial	71
2. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial	72
D. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Dalam Melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial Guna Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama Di Perusahaan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Dan Pengusaha	74
1. Dasar Hukum Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit	74
2. Bentuk Dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Pembinaan Hubungan Industrial	76
3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial	80

4. Hasil Yang Diperoleh Selama Diadakannya Pembinaan	
Hubungan Industrial	81
BAB III PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

